

IMPLEMENTASI GERAKAN DESA MENGAJAR DALAM PENINGKATAN ANGKA MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

David Mayor¹, Ajeng Ayu Syafitri²

¹⁾ Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²⁾ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

ajengsyafitri94@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of the Village Teaching Movement in Increasing Literacy Rates and Average School Length in Bogor Regency, , West Java Province . The Bogor District Government formed the Village Teaching Movement with the aim of increasing the accessibility of education and providing education services on non-formal channels. This study aims to find out how the implementation of the Village Teaching Movement Program in Increasing Literacy Numbers and the Average School Length in Bogor Regency, supporting and inhibiting factors, and efforts made by the government in overcoming these obstacles. This research was conceptualized based on the implementation theory proposed by George Edwards III with qualitative descriptive research methods and inductive approaches. Data obtained by using data collection techniques through interviews, observation, documentation, and triangulation. Data analysis techniques are used through data reduction, data presentation, and data verification. The results of the study show that the implementation of the Village Teaching Movement in Increasing Literacy and the Average School Length in Bogor Regency has been going well but has not been maximized. In the implementation of this program there were a number of obstacles including changes in policy, uneven socialization and low public participation. For this reason, the Bogor District Education Office seeks to improve the quality of education services and increase the establishment of junior high schools in a number of districts.

Keywords: *implementation, village teaching movement, education*

ABSTRAK

Implementasi Gerakan Desa Mengajar dalam Peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membentuk Gerakan Desa Mengajar dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan pada jalur nonformal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Gerakan Desa Mengajar dalam Peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor, faktor pendukung dan penghambat, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dikonsept berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III dengan

metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa implementasi Program Gerakan Desa Mengajar dalam Peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa kendala di antaranya terjadi perubahan kebijakan, belum meratanya sosialisasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berupaya dengan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan memperbanyak pendirian sekolah lanjutan tingkat pertama di sejumlah Kecamatan.

Kata kunci: implementasi, gerakan desa mengajar, pendidikan

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 tercantum bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada urusan konkuren dibagi lagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar khususnya di bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tersebut semakin menguatkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di wilayahnya.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dengan visi “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan lima misi. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan misi tersebut, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memiliki tujuan dan sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RRLS) dan terwujudnya wajib belajar 9 tahun yang berkualitas.
- 2) Tuntasnya buta aksara.

Dalam rangka perluasan akses pendidikan untuk semua yang berkeadilan dan sepanjang hayat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bidang Pendidikan Nonformal menyusun suatu program yaitu Gerakan Desa Mengajar untuk menangani Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan. Berpedoman pada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal pada Pasal 1 Ayat (13) yang dimaksud dengan pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia. Berikutnya pada Pasal 1 ayat (15) program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Program Gerakan Desa Mengajar merupakan suatu program yang simultan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran kepala desa/lurah dan perangkat desa/perangkat kelurahan dalam meningkatkan akses layanan pendidikan sehingga sumber daya manusia dalam spektrum pedesaan dapat terlayani secara komprehensif. Dengan adanya Program Gerakan Desa Mengajar diharapkan dapat menuntaskan Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk usia 15-60 tahun serta tercapainya rata-rata lama belajar di sekolah sembilan tahun.

Tabel 1 Capaian APK, APM, AMH, dan RRLS

Angka Partisipasi Kasar	SD-MI-PA	90.1
	SMP/MTS/PB	88.12
	SMA/SMK/MA-PC	59.61
Angka Partisipasi Murni	SD-MI-PA	81.25
	SMP/MTS/PB	77.08
	SMA/SMK/MA-PC	50.95
Angka Melek Huruf		96.98
Rata-rata Lama Sekolah		8.04

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, 2014

Keterangan:

APK = Angka Partisipasi Kasa,
 APM = Angka Partisipasi Murni,
 AMH = Angka Melek Huruf

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditunjukkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RRLS) masyarakat Kabupaten Bogor yang baru mencapai 8,04 tahun, atau baru mencapai kelas 2 SMP yang berarti tidak tamat SMP. Sedangkan pemerintah telah mewajibkan masyarakatnya untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun atau lulus SMP. Adanya pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar bertujuan untuk mempercepat tercapainya target tahun 2018 di Kabupaten Bogor, pendidikan rata-rata minimal sembilan tahun. Diharapkan pada 2018 angka rata-rata lama sekolah yang saat ini baru mencapai angka 8,04 tersebut meningkat sesuai dengan misi Kabupaten Bogor sehingga mencapai angka 9,00 atau setara lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Siswa Putus Sekolah (DO) pada Semua Jenjang Negeri dan Swasta Tahun Ajaran 2015/2016

NO	JEN-JANG	N		S		JUMLAH		JUM-LAH
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	450	251	69	52	519	303	822
2	MI	-	-	250	208	250	208	458
3	SMP	183	170	403	272	586	442	1.028
4	MTs	2	1	458	352	460	363	813
5	SMA	41	21	76	42	117	63	180
6	MA	2	2	23	17	25	19	44
7	SMK	36	17	357	186	393	203	596
JUMLAH		714	462	1.636	1.129	2.350	1.591	3.941

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, 2014

Mengartikan data yang tertera pada tabel 2 di atas, terlihat dengan jelas bahwa jumlah siswa putus sekolah yang tertinggi yaitu pada jenjang SMP dengan jumlah 1.028 siswa. Hal ini yang memicu rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor belum mencapai standar minimal sembilan tahun. Berdasarkan Data Susenas, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi siswa putus sekolah yaitu karena biaya pendidikan yang dinilai semakin mahal, masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu, kesenjangan tingkat pendidikan penduduk yang berada di daerah perkotaan dan perdesaan, ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas yang belum merata khususnya di daerah kecamatan yang jauh dari perkotaan, dan dengan sistem insentif yang belum membedakan tingkat kesulitan, pendidik cenderung lebih menyukai mengajar di wilayah perkotaan.

Berkaitan dengan kondisi di atas, maka pada tahun 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bidang Pendidikan Nonformal bertekad mendorong tumbuhnya akses layanan pendidikan pada jalur nonformal dengan membentuk Gerakan Desa Mengajar. Diharapkan program ini dapat mempercepat dan memperluas akses layanan pendidikan nonformal sehingga RRLS dapat mencapai 9,00, dan penuntasan AMH dalam kurun waktu dua tahun mendatang yaitu pada tahun 2018 yang telah dicanangkan sebagai visi kabupaten termaju di Indonesia dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melibatkan perangkat kecamatan hingga desa sebagai ujung tombak pelaksanaannya. Dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, ada 10 (sepuluh) wilayah yang termasuk kategori terendah yaitu Kecamatan Sukamakmur,

Megamendung, Tenjo, Cijeruk, Jonggol, Klapanunggal, Leuwisadeng, Tenjolaya, Pamijahan, dan Cariu dengan rentang rata-rata lama sekolah 4,25 sampai dengan 7,16 tahun. Kesepuluh wilayah tersebutlah yang saat ini menjadi titik fokus Pendidikan Nonformal di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk menggenjot angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Salah satu yang menjadi faktor terhambatnya akses layanan pendidikan di sepuluh wilayah tersebut yaitu karena jarak tempuh yang jauh antara pemukiman warga dengan akses layanan pendidikan.

Melalui program Gerakan Desa Mengajar diharapkan dapat membentuk kawasan desa menjadi sentra pendidikan, dengan mengoptimalkan peran fungsi dan tanggung jawab desa/kelurahan dalam mendayagunakan PKBM, Majelis Taklim, pondok pesantren, salafiah, rumah pintar, taman bacaan masyarakat (TBM), kursus dan kelompok belajar (Pokjar), dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C dan pendidikan Keaksaraan Dasar/Keaksaraan Fungsional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan: bagaimana implementasi dari Program Gerakan Desa Mengajar di Kabupaten Bogor? Penelitian ini menggunakan konsep Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi

suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Menurut Moch. Nazir (1988: 63), metode deskriptif didefinisikan sebagai “Suatu metode dengan meneliti status kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun peristiwa di masa sekarang”. Tujuan penelitian deskriptif ialah untuk memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena. Selanjutnya Moch. Nazir (1988: 105) mengemukakan, “Penelitian Deskriptif merupakan study untuk menemukan fakta-fakta dengan interpretasi tepat”.

Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Gerakan Desa Mengajar dalam Peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor

Menurut pakar ilmu kebijakan publik George C. Edwards III tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya

merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah membuat suatu program yaitu Program Gerakan Desa Mengajar. Penulis menggunakan teori George Edwards III dalam melihat Implementasi Program Gerakan Desa Mengajar yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Teori Edwards III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis sesuai dengan indikator dan sub indikator implementasi, maka dapat dianalisis bagaimana implementasi program Gerakan Desa Mengajar dalam peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor sebagai berikut.

- **Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan

(*policy implementors*). Komunikasi sebagai pemegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan tentunya dipengaruhi pula oleh keberhasilan dari tiga unsur penentu yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Ketiga unsur ini saling berhubungan satu sama lain dan berpengaruh penting dalam implementasi kebijakan. Semakin sering komunikasi dilakukan, maka implementasi kebijakan akan semakin baik.

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi Program Gerakan Desa Mengajar dari Dinas Pendidikan hingga kecamatan dan desa telah dilaksanakan dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang diperoleh penulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Pendidikan Nonformal, Camat, dan Kepala Desa dengan jawaban yang diberikan menggambarkan bahwa proses komunikasi melalui sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan yaitu ketika penulis melakukan wawancara dengan Ketua BPMPD selaku tim pengarah Program Gerakan Desa Mengajar tingkat Kabupaten, beliau menyatakan bahwa, “belum ada sosialisasi mengenai program ini kepada saya, saya belum mengetahui, yang ada justru program mengenai kelas jauh”. Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Program Gerakan Desa Mengajar belum tersosialisasikan dengan baik kepada SKPD terkait. Sesuai dengan observasi peneliti berdasarkan fakta di lapangan, komunikasi yang dilakukan pemerintah perlu dilakukan secara optimal sehingga petunjuk pelaksanaan dapat dipahami

dengan baik. Analisis mengenai indikator komunikasi lebih mendalam berdasarkan sub indikator sebagai berikut.

A. TRANSMISI (PENYAMPAIAN INFORMASI)

Penyampaian informasi yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan dengan baik, dalam penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik namun dalam penyampain informasi ini sering kali terjadi masalah dalam penyampaian informasi yaitu adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi. Dimensi transmisi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Program Gerakan Desa Mengajar telah disosialisasikan kepada 10 (sepuluh) kecamatan dengan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah terendah di Kabupaten Bogor untuk memberikan pengetahuan yang kemudian akan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh tiap kecamatan kepada Kepala Desa tentang bagaimana pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar dalam rangka peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah.

Penyampaian informasi tentang pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui sosialisasi kepada sepuluh kecamatan dan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sadeng Kolot, Kecamatan Leuwisadeng, Bapak Sahri menyatakan bahwa:

”Sosialisasi sudah dilakukan di Desa Sadeng Kolot yang dihadiri oleh

masyarakat yang antusias. Dengan adanya program dari Dinas Pendidikan ini tentang Desa Mengajar, saya berharap ini bisa menjadi bahan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa menulis dan membaca. Saya tidak mau kalau di desa Sadeng Kolot ada yang putus sekolah, apa lagi tidak mempunyai ijazah. Bagaimana mau maju kalau niat belajar nya tidak kita bantu.”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami ditunjukkan kepada sasaran yang paling tepat yaitu kepada masyarakat dan warga belajar.

B. KEJELASAN (CLARITY)

Komunikasi yang ditransmisikan kepada pelaksana maupun penerima program harus diterima dengan jelas dan tidak ambigu (tidak membingungkan) sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran pelaksanaan program tersebut. Kejelasan petunjuk dalam pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar bermula dari penyampaian yang jelas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku tim pelaksana tingkat kabupaten kepada aparat kecamatan dan akhirnya informasi dilanjutkan kepada aparat desa dan warga belajar. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan dalam penyampaian informasi. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat. Hal tersebut sangat

penting untuk implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada warga belajar.

C. KONSISTENSI

Konsisten merupakan tindakan yang dilakukan terus menerus untuk mencapai tujuan. Konsistensi dapat terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan. Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur tetap pada alur pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan akan menghasilkan kualitas yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program Gerakan Desa Mengajar dalam peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Program Gerakan Desa Mengajar dalam Peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan Program Gerakan Desa Mengajar dengan menggunakan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Camat Leuwisadeng, Bapak Mad Hasan mengatakan bahwa, “tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat tercapainya target tahun 2018 di Kabupaten Bogor pendidikan rata-

rata minimal 9 tahun. Perlu tuntas masalah pendidikan, termasuk rata-rata lama sekolah, di sini masih delapan tahun. Kita minimal harus sembilan tahun,” Dari hasil wawancara dengan Camat Leuwisadeng dapat disimpulkan bahwa camat dengan dengan konsisten akan terus mendukung demi tercapainya target rata-rata lama sekolah sembilan tahun.

E. SUMBER DAYA

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terlaksananya keberhasilan suatu implementasi kebijakan, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Program Gerakan Desa Mengajar memiliki sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilannya dalam peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor. Sumber-sumber Program Gerakan Desa Mengajar yaitu sumber daya manusia dari aparatur, informasi, fasilitas, dan wewenang.

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya untuk tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas suatu kebijakan. Peran

sumber daya manusia di dalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi. Aparatur atau *staff* pemerintahan merupakan aset yang paling penting. *Staff* diharapkan mampu, pandai, dan terampil juga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila *staff* yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang terampil dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya.

Aparatur yang berkualitas adalah aparatur yang memberikan pelayanan secara profesional dengan mengedepankan tujuan implementasi Program Gerakan Desa Mengajar di Kabupaten Bogor yang berdasarkan tugas pokok aparatatur atau *staff* tersebut. Untuk membentuk sumber daya aparatur yang berkualitas dalam pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar, Kepala Desa menunjuk Ketua PKBM sebagai pengelola di lapangan dan tutor-tutor yang telah direkrut dan memiliki kompetensi dalam bidangnya, sebagai upaya untuk keberhasilan program tersebut.

Berikut ini Susunan Tim Pelaksana Kegiatan dan Lembaga Penyelenggara Kelompok Belajar Program Desa Mengajar Paket A, Paket B, dan Paket C di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016:

Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pendidikan

Wakil Penanggung Jawab: Sekretaris Dinas Pendidikan

Pengendali Kegiatan: Kepala Bidang Pendidikan Non Formal

Ketua: Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan

Anggota:

1. Opik Ropiudin, S.Si., MM
2. Suryaningsih
3. Komariah, S.Pd.
4. Asep Solihin, S.Pd.
5. Sukanta

Tim Pelaksana Kecamatan: Satu orang perwakilan dari tiap kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Cipayung, mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia sudah sangat menunjang, khususnya untuk di Desa Cipayung, beberapa perangkat desa juga saya berikan instruksi untuk ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu berperan sebagai tutor. Kemudian tutor dan tim pengajar yang lain kami serahkan kepada PKBM untuk merekrut tutor dengan standar kompetensi yang sudah ditentukan, yaitu minimal bergelar sarjana strata satu. Sedangkan dari perangkat desa saya pilih yang memiliki keahlian sebagai pengajar.”

Dari data di atas dan penuturan Kepala Desa Cipayung tersebut penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia khususnya sebagai tim pengajar sudah menunjang untuk pelaksanaan program dan susunan tim pelaksana juga sudah jelas, sehingga masing-masing dari SDM tersebut sudah memiliki perannya dalam pelaksanaan program.

2) Sumber Daya Fasilitas (*Facilities*)

Sumber daya fasilitas merupakan sumber daya peralatan pendukung dalam penyelenggaraan program baik sarana maupun prasarana. Pelayanan yang ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah ke arah yang lebih baik. Fasilitas-fasilitas yang ada dalam penyelenggaraan Program Gerakan Desa Mengajar masih sangat minim. Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Kepala Desa memfasilitasi para warga belajar yaitu dengan menggunakan ruang kelas dari Sekolah Dasar yang ada di desa tersebut. Selain itu juga dengan menggunakan Balai Desa. Tempat-tempat yang digunakan yaitu yang lokasinya berada di tempat yang strategis dan tidak jauh dari tempat tinggal para warga belajar. Selain itu juga lokasi yang digunakan berada di dekat Kantor Desa agar dalam pelaksanaannya dapat terus dalam pantauan para aparat desa.

3) Sumber Daya Informasi dan Wewenang (*information and authority*)

Informasi merupakan sumber daya penting bagi suatu pelaksanaan kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program, serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi mempunyai peranan yang

sangat penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal oleh segenap pelaksana kebijakan atau program. Informasi yang relevan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu program khususnya dalam Program Gerakan Desa Mengajar dalam peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekola dapat terintegrasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana kebijakan tidak melakukan suatu kesalahan dalam mengimplementasikan atau melaksanakan Program Gerakan Desa Mengajar tersebut. Di samping itu, informasi sangat penting untuk menyadarkan aparatur dan tim pelaksana yang terlibat dalam implementasi Program Gerakan Desa Mengajar supaya dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan.

Informasi yang diberikan oleh aparatur pelaksana Program Gerakan Desa Mengajar kepada masyarakat sebagai warga belajar sudah jelas dan konsisten. Informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah dapat dipahami, dimengerti, dan diikuti sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hal ini dibuktikan dengan antusias para warga belajar untuk mengenyam pendidikan pada jalur nonformal. Sehingga, target tuntasnya buta aksara dan pencapaian penyelenggaraan akses pendidikan dapat tercapai. Wewenang

tim pelaksana telah tertulis jelas dalam pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar. Dengan pembagian tugas dan wewenang yang telah jelas ini, maka pelaksanaan tugas akan terarah dan sesuai dengan tupoksi masing-masing tim. Sejauh ini belum ada laporan negatif mengenai penyelenggara program dari masyarakat kepada pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa tim pelaksana telah melaksanakan wewenangnya dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada dan telah ditetapkan.

- **Disposisi**

Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi kebijakan merupakan hal terpenting dari pengaruh disposisi, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat memengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Keinginan dan kemauan aparatur dapat dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan yang dijalankan atau dilaksanakan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral. Pengaruh disposisi atau tingkat kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi program Gerakan Desa Mengajar dalam Peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor.

Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah maksud dari tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana khususnya aparatur tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan kebijakan yang merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar

dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana Program Gerakan Desa Mengajar telah berjalan dengan baik sesuai dengan struktur birokrasi yang ditentukan dan tunjangan tertentu yang diberikan yang dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) **PENGANGKATAN BIROKRAT**

Komitmen para tim pelaksana Program Gerakan Desa Mengajar merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh para pelaksana atau implementor, karena dengan berkomitmen para pelaksana dapat melaksanakan Program Gerakan Desa Mengajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Implementasi Program Gerakan Desa Mengajar sepenuhnya mengacu pada prosedur, dasar hukum, dan peraturan yang telah ditetapkan. Tim pelaksana yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar diangkat dan dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa:

“Dinas Pendidikan menangkat tutor dan tim pengajar sesuai dengan juknis yang telah dibuat. Artinya tidak asal comot sana comot sini, tetapi sudah ada standar tersendiri. Misalnya untuk tim pengajar harus bertitel sarjana S-1 atau Diploma IV, itu nantinya sebagai tim pengajar di kesetaraan program paket C. Sedangkan untuk program

kesetaraan paket A dan B minimal memiliki pendidikan setara Menengah Pertama. Jadi dalam perekrutan tutor juga tidak sembarangan.”

Dari penuturan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat disimpulkan bahwa telah diatur secara sistematis struktur birokrasi pelaksana Program Gerakan Desa Mengajar dan yang terpenting adalah kesiapan dan tanggung jawab dari pelaksana sendiri dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

2) INSENTIF

Insentif yang ada pada pelaksana melalui manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya akan membuat pelaksana melaksanakan perintah dengan baik dalam implementasi Program Gerakan Desa Mengajar di Kabupaten Bogor. Merubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi berjalan sesuai tujuan. Umumnya para petugas pelaksana bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu yang akan mendorong pelaksanaan kebijakan menjadi lebih baik meskipun itu di luar peraturan yang telah ditetapkan dimana para petugas pelaksana tidak diperbolehkan meminta sesuatu atau memungut sejumlah biaya kepada masyarakat di luar administrasi dengan alasan apa pun.

Insentif yang ada pada pelaksana atau implementor oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya akan membuat pelaksana melaksanakan perintah dengan baik

dalam implementasi Program Gerakan Desa Mengajar dalam peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKBM Prima Lestari, menyatakan bahwa “insentif diberikan kepada tutor berupa tunjangan guna memberikan motivasi kepada para tutor untuk terus meningkatkan kinerjanya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.”

• *Struktur Birokrasi*

Struktur birokrasi atau birokrasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personel yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur berupa gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam Program Gerakan Desa Mengajar dalam peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya standar operasional prosedur. SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas

Pendidikan Kabupaten Bogor pada wawancara yang penulis lakukan bahwa, “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Dengan melibatkan perangkat kecamatan hingga desa, sebagai ujung tombak pelaksanaannya,” Dengan demikian dari hasil wawancara tersebut bahwa struktur birokrasi yang ada dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam penyelenggaraan program untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

- **Standar Operasional Prosedur**

Standar Operational Procedures, merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar dalam peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor. *Standar Operational Procedures (SOP)* merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para petugas pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pada jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Salah satu dari aspek-aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja dari ukuran dasar *Standard Operational Procedures (SOP)*.

Standard Operational Procedures (SOP) dalam pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan Gerakan Desa Mengajar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan yang berlaku. Pelayanan yang maksimal dan transparan yang dilakukan oleh tim pelaksana memiliki beberapa

tujuan yaitu memberikan keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Desa Mengajar dalam hal ini yaitu kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan nonformal, memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur atau pedoman yang telah ditentukan, memberikan pelayanan yang jujur kepada warga belajar. Berdasarkan uraian di atas tentang SOP pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar, mendorong tim pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah agar terwujudnya visi Kabupaten Bogor yaitu Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

- **Fragmentasi**

Struktur birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di dalam tugasnya sudah dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan tugasnya sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Karena itu, stuktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*).

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kegiatan sangat memengaruhi dalam implementasi Program Gerakan Desa Mengajar dalam Peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Hubungan yang terjadi antara pelaksana Program Gerakan Desa Mengajar dengan proses kegiatan belajar mengajar dalam bidang pendidikan nonformal khususnya penyeteraan

pendidikan sangat memengaruhi terhadap pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar dalam peningkatan AMH dan RRLS, apabila pola hubungan yang terjadi antar pelaksana Program Gerakan Desa Mengajar dengan warga belajar tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan Program Gerakan Desa Mengajar dalam peningkatan AMH dan RRLS. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat akan berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan Program Gerakan Desa Mengajar dan hal ini telah dilakukan dalam dua tahun berjalannya program ini karena kerja sama dan koordinasi yang baik sesuai dengan tupoksi masing-masing.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik simpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan dapat disimpulkan bahwa Program Gerakan Desa Mengajar dalam pelaksanaannya sudah baik namun belum maksimal. Angka Melek Huruf sudah mencapai target dan mendapat penghargaan dari UNDP namun angka Rata-rata Lama Sekolah belum mencapai target dikarenakan terjadinya perubahan perhitungan standar usia produktif manusia dari Badan Pusat Statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- Agustino, Leo. (ed. Rev) . 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Alifuddin, Moh. 2011. *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi*. Jakarta: Magna Script Publishing.
- Cohen, Louis., dkk. 2007. *Research Methods in Education Sixth Edition*. USA: Routledge
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. 2005. *The Sage Handbook of Qualitative Research Third Edition*. California: Sage Publication, Inc.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Miles, B. B., dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muttalib, M.A., dan Mohd. Akbar Ali Khan. 2013. *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: MIPI.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prawiradilaga, Dewi Salma. 2012. *Wawasan Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Bandung: Alqa Prisma Interdelta.
- Taluziduhu, Ndraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wargadinata, Ella. 2014. *Metodologi Penelitian Praktis*. Jatinangor: IPDN.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

Sumber Lain

<http://disdikbogorkab.go.id>

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penetapan Lembaga Penyelenggara Kelompok Belajar Program Desa Mengajar Paket A, Paket B, dan Paket C di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016
- Pedoman Pelaksanaan Gerakan Desa Mengajar 2015
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor 2013-2018
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Periode 2013-2018

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

